



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO UMUM
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DENGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

NOMOR: HK.02.00/02/2026

NOMOR: [REDACTED]

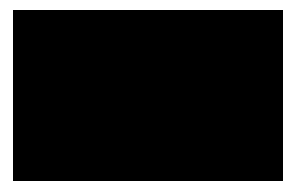
**TENTANG
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (26-01-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : Kepala Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 161 Tahun 2025 tanggal 5 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar,

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

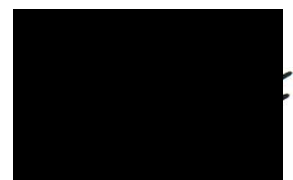
2.  : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0331005/KPG Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa Nomor 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendukung tugas dan fungsi badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik melalui Sekretaris Utama, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik;
3. bahwa berdasarkan surat dari **PIHAK PERTAMA** Nomor: B-DL.00/144/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Pelatihan Dasar CPNS BNPT T.A 2024;

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



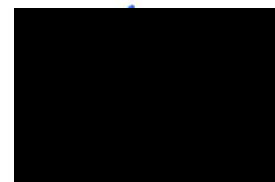
4. bahwa berdasarkan Surat dari **PIHAK KEDUA** Nomor: B-168B/02600/DL.210/2026, tanggal 23 Januari 2026 perihal Balasan Surat Permohonan Fasilitas Pelatihan Dasar CPNS BNPT T.A 2024; dan
5. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Badan Pusat Statistik Nomor: HK.02.00/01/2026 dan Nomor: 01/MOU.PUSDIKLAT BPS/26-I/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana diubah oleh Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah oleh Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);
 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; dan
 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS BNPT.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat khususnya di lingkungan BNPT.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS BNPT sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang terdiri dari golongan III sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang dan Golongan II sebanyak 14 (empat belas) orang.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan Latsar CPNS BNPT dilaksanakan 1 (satu) Gelombang mulai tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS BNPT T.A. 2024 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem:

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



- a. Pembelajaran mandiri selama 9 (sembilan) hari pada tanggal 2 Februari 2026 sampai 11 Februari 2026 dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.
 - b. *Distance Learning* selama 19 (sembilan belas) hari kerja pada tanggal 12 Februari sampai 12 Maret 2026 hari.
 - c. Habitulasi selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 30 Maret sampai 2 Mei 2026.
 - d. Klasikal selama 6 (enam) hari pada tanggal 4 Mei sampai 9 Mei 2026 di Pusdiklat BPS.
- (3) Materi dan jam pelajaran diatur dalam pedoman yang akan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

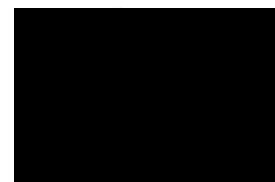
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Latsar CPNS BNPT yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima laporan pelaksanaan Latsar CPNS BNPT yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan pendataan peserta Latsar CPNS BNPT T.A. 2024.
 - b. Menyerahkan hasil pendataan peserta Latsar CPNS BNPT T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyerahkan peserta latsar kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menugaskan personel (*contact person*) sebagai penghubung yaitu Ibu [REDACTED] (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda) +62 [REDACTED] selama pelaksanaan kegiatan.
 - e. Memantau dan mengawasi peserta Latsar CPNS selama pelaksanaan Habitulasi.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



- f. Menyiapkan mentor dalam rangka penyusunan aktualisasi.
 - g. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Latsar CPNS.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima hasil pendataan peserta Latsar CPNS BNPT dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menerima kelengkapan administrasi peserta Latsar CPNS BNPT dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menerima peserta Pelatihan Dasar CPNS BNPT dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima biaya penyelenggaraan Latsar CPNS BNPT dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan sistem pembayaran yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS BNPT sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
 - b. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS BNPT dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS BNPT.
 - d. Memberikan laporan pelaksanaan Latsar CPNS BNPT kepada Lembaga Administrasi Negara dan **PIHAK PERTAMA**.

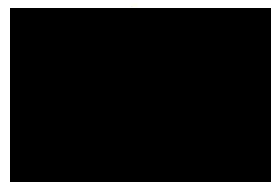
Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada DIPA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2026.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Pasal 6**TATA CARA PEMBAYARAN**

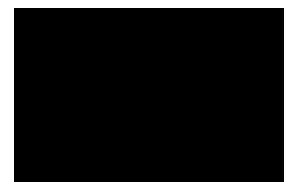
- (1) Pembayaran biaya Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR CPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 5.260.000,- x 127 orang = Rp668.020.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan metode LS Pihak ke-3 SAKTI menggunakan sistem pembayaran 2x (dua kali) termin. Termin ke-1 sebesar Rp334.010.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal **2 Maret 2026** sedangkan termin ke-2 dibayarkan pada tanggal **30 April 2026** sebesar Rp334.010.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi kendala teknis, administratif, atau keadaan di luar kendali yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran setiap termin, untuk selanjutnya disepakati bersama mengenai penyesuaian jadwal pembayaran tanpa mengubah total nilai kontrak.

Pasal 7**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS BNPT T.A. 2024.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mempunyai akibat langsung maupun tidak langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memusyawarahkan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

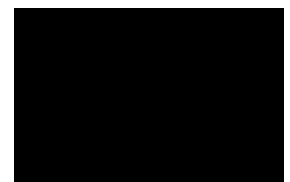
Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama, dapat dilakukan melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



a. PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Umum

Alamat :

Telepon :

E-mail :

b. PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Alamat :

Telepon :

E-mail :

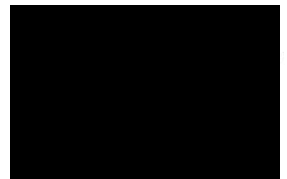
- (2) Apabila terjadi perubahan jabatan, alamat, telepon dari masing-masing **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11**ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

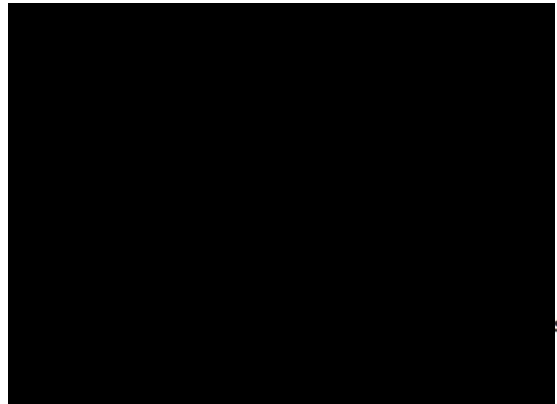
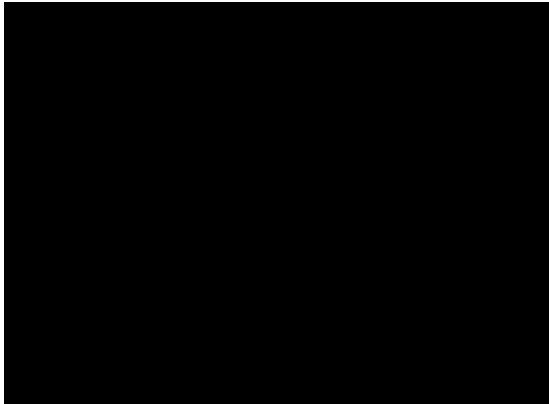
Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Pasal 12**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama.



Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:

